



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN ENHANCING CORPORATE BUSINESS ETHICS

Neta Nirda^{1*}, Zavhiscka Tjotjona², Paolaa. Pariama³, Maulana Z Karepesina⁴,
Muhammad Anwar Malawat⁵, Suristiawati Dana⁶

^{1*,2,3,4,5,6}Universitas Pattimura, Email: nirdaasaga@gmail.com

*email koresponden: nirdaasaga@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.2801>

Abstrack

The rise in cases of business ethics violations such as corruption, financial report manipulation, and abuse of office currently threatens long-term business sustainability and damages public trust. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is generally adopted by companies as a system to create transparent and responsible governance. However, the implementation of GCG in the field often faces obstacles such as weak management commitment and conflicts of interest, so a comprehensive analysis of effective ethics internalization strategies is needed. This study aims to examine the application of GCG principles—namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—in minimizing deviant practices and formulating solutions to the obstacles to their implementation. This study uses a qualitative literature method with a descriptive approach (library research). The results of the analysis conclude that strengthening GCG instruments balanced with exemplary leadership and an ethical work culture has been proven to be significantly able to reduce fraud rates, maintain operational reliability, and secure the company's reputation in the long term.

Keywords: *Good Corporate Governance, Business Ethics, Transparency, Accountability, Corporate Sustainability.*

Abstrak

Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban—dalam meminimalisir



praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*library research*). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan Korporasi.

1. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika perekonomian global yang kompetitif, menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha jangka panjang menjadi aset paling berharga bagi setiap perusahaan. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk mengejar keuntungan finansial semata, melainkan juga harus mampu menunjukkan integritas moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Namun pada realitasnya, dunia usaha masih sering dihangatkan oleh maraknya kasus pelanggaran etika bisnis. Praktik-praktik menyimpang seperti tindakan korupsi, manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen, hingga penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi masih sering terjadi. Skandalskandal ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan pasar dan menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Masih sering terjadi dalam dunia usaha dan dapat menurunkan kepercayaan investor maupun masyarakat (Effendi, 2016).

Menghadapi fenomena tersebut, perusahaan sangat memerlukan sebuah sistem tata kelola yang baik agar seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Sistem ini penting untuk membatasi ruang gerak penyalahgunaan wewenang dan memberikan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam konteks ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) hadir sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan etika bisnis Perusahaan (KNKG 2006). GCG menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, perusahaan dapat dibantu untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, jujur, dan profesional. Ketika transparansi dan akuntabilitas dijadikan landasan utama, maka perilaku tidak etis dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan GCG bernilai sangat penting dan mendesak dalam meningkatkan etika bisnis perusahaan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan (Zed, 2004). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta objektif mengenai dinamika serta mekanisme penegakan etika melalui instrumen tata kelola korporat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat valid dan ilmiah, meliputi:

1. Jurnal online terakreditasi nasional maupun internasional.
2. Artikel ilmiah resmi yang membahas tata kelola dan manajemen risiko.
3. Referensi internet bereputasi serta regulasi resmi yang berkaitan erat dengan *Good Corporate Governance* dan etika bisnis.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu metode studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji informasi serta data konseptual dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, buku teks, dan sumber internet yang relevan dengan fokus bahasan objek penelitian.

Kemudian, data dianalisis secara deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data, mengklasifikasikan informasi berdasarkan variabel GCG dan



etika bisnis, lalu menjabarkan teori serta temuan yang diperoleh secara naratif guna menarik kesimpulan yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar GCG Dan Etika Bisnis

a. Good Corporate Governance Secara doktriner

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola kedewanan dan manajerial yang mengintegrasikan berbagai kepentingan entitas secara seimbang. Menurut Cadbury Committee, GCG adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keserasian antara kekuatan korporasi dan pertanggungjawabannya kepada publik.

Menurut KNKG (2006), Good Corporate Governance merupakan seperangkat proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam ranah operasional, tata kelola yang baik ini mengatur jalinan hubungan yang mengikat antara tiga organ utama korporasi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris selaku pengawas, dan Direksi sebagai pelaksana eksekutif aktivitas bisnis.

Tujuan utama dari internalisasi GCG tidak lagi terbatas pada maksimisasi keuntungan jangka pendek para pemilik modal (shareholders), melainkan berorientasi pada penciptaan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti karyawan, pemasok, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, GCG bertujuan meningkatkan kontribusi aktif korporasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, meminimalkan biaya modal melalui pengurangan risiko, serta memastikan manajemen risiko berjalan efektif melalui fungsi struktural penunjang seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Direktur Independen, serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (OECD, 2023).

b. Etika Bisnis

Merupakan subsistem dari etika umum yang berfokus pada kodifikasi nilai moral, norma, dan standar perilaku yang memandu tindakan serta pengambilan keputusan sebuah organisasi bisnis. Nilai-nilai fundamental yang mengakar dalam etika bisnis mencakup kejujuran dalam beriklan dan bermitra, keadilan dalam memperlakukan seluruh elemen tenaga kerja, integritas personal, kepatuhan mutlak terhadap regulasi hukum (legal compliance), serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai moral dalam aktivitas bisnis yang bertujuan menciptakan perilaku usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. (Carroll & Buchholtz, 2015), Etika bisnis memegang peran krusial sebagai kompas moral bagi para pelaku usaha. Kehadirannya memastikan bahwa pencapaian efisiensi dan profitabilitas finansial tidak diraih melalui cara-cara yang merugikan ekosistem luar atau mengorbankan hak-hak pihak lain demi keuntungan sepihak. Etika bisnis memanifestasikan dirinya dalam bentuk prinsip moral yang tidak tertulis namun memiliki daya ikat sosial dan psikologis yang kuat dalam membentuk reputasi jangka panjang korporasi.

c. Hubungan Good Corporate Governance dengan Etika Bisnis

Hubungan antara GCG dan etika bisnis bersifat simbiotikorganik, di mana keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan iklim industri yang sehat. Berdasarkan temuan empiris dalam Jurnal Ekonomi Perusahaan, etika bisnis diposisikan sebagai pondasi dasar spiritual dan moral yang menjiwai seluruh struktur tata kelola. Secara analogis, GCG bertindak sebagai perangkat keras struktural (hardware)—seperti regulasi tertulis, mekanisme komite audit, rapat kerja resmi, dan bagan organisasi—sedangkan etika bisnis berperan sebagai perangkat lunak (*software*) berupa integritas personal dan kesadaran moral yang menggerakkan sistem struktural tersebut. Tanpa adanya internalisasi etika bisnis yang kuat pada diri individu pimpinan dan staf, regulasi formal GCG hanya akan berakhir menjadi formalitas administratif di atas kertas tanpa dampak riil di lapangan (*window dressing*). Sebaliknya, tanpa adanya adopsi sistem GCG yang kokoh, nilai-nilai etika luhur tidak akan memiliki instrumen penegakan hukum internal yang tegas untuk memaksa kepatuhan. Sinergi antara sistem tata kelola yang kokoh dan moralitas perilaku yang luhur merupakan kunci utama



dalam membentuk entitas bisnis yang bersih, akuntabel, dan terpercaya Penerapan GCG yang efektif dapat memperkuat budaya etis perusahaan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap aktivitas manajemen (OECD, 2023).

Prinsip – Prinsip GCG

Penerapan tata kelola yang baik di Indonesia secara universal wajib bersandar pada Pedoman Umum GCG yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang mencakup lima pilar utama yang dikenal dengan akronim TARIF KNKG (2006) menjelaskan bahwa penerapan GCG di Indonesia didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran:

- Transparansi (*Transparency*):** Prinsip ini menuntut perusahaan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan cara menyediakan informasi material yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya mencakup masalah laporan keuangan tahunan, tetapi juga keterbukaan proses pengambilan keputusan strategis, perubahan kepemilikan saham, serta risiko - risiko operasional yang dihadapi tanpa mengurangi rahasia jabatan atau hak kekayaan intelektual perusahaan
- Akuntabilitas (*Accountability*):** Prinsip akuntabilitas menggarisbawahi pentingnya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas yang terukur, pengelolaan korporasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Setiap organ (RUPS, Komisaris, Direksi) harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik berdasarkan target bisnis yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan benturan wewenang.
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*):** Pilar pertanggungjawaban menekankan bahwa dalam mengelola operasionalnya, perusahaan harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini mencakup pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), keselamatan kerja karyawan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan secara jujur sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian ekosistem sekitar.
- Kemandirian (*Independency*):** Kemandirian mensyaratkan agar korporasi dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Perusahaan harus bebas dari segala bentuk pengaruh, tekanan, intervensi, maupun dominasi dari pihak manapun—termasuk dari pemegang saham pengendali—yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum, anggaran dasar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keadilan dan Kesetaraan (*Fairness*):** Prinsip ini memberikan jaminan perlakuan yang adil, setara, dan proporsional terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa pengecualian. Dalam aspek ini, hak-hak pemegang saham minoritas dan investor asing harus dilindungi secara adil dari tindakan penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas. Hak mitra kerja, pemasok, dan karyawan juga harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja bersama yang disepakati. Kelima prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan (KNKG, 2006).

Penerapan GCG Dalam Perusahaan

Implementasi riil dari kelima prinsip GCG tersebut di dalam aktivitas internal perusahaan diwujudkan melalui penguatan empat pilar fungsional:

- Struktur Organisasi yang Jelas:** Langkah mendasar dimulai dengan memetakan secara tertulis garis instruksi, koordinasi, tanggung jawab, dan pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang tegas antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kejelasan struktur ini krusial untuk mencegah terjadinya monopoli pengambilan keputusan sepihak atau tumpang tindih fungsi kerja yang dapat memicu inefisiensi. Kejelasan struktur organisasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan (OECD, 2023).
- Penyusunan Pedoman Etika (*Code of Conduct*):** Korporasi wajib merumuskan sebuah Buku Pedoman Perilaku resmi yang mengkodifikasi standar etika kerja harian. Pedoman ini mengikat seluruh jajaran personel secara mutlak—mulai dari komisaris hingga staf operasional terbawah. Buku saku ini memuat panduan etis mengenai larangan menerima gratifikasi, kebijakan



- antipenyuapan, pelarangan transaksi orang dalam (insider trading), serta batasan bersosialisasi dengan kompetitor. Pedoman perilaku menjadi instrumen penting dalam membangun budaya etis di lingkungan perusahaan (Effendi, 2016).
- c. Sistem Pengawasan: Perusahaan harus mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta Komite Audit yang diisi oleh kalangan profesional independen dari luar manajemen. Merujuk pada penelitian dari *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship* (JMIE), eksistensi Komite Audit dan Direktur Independen berperan vital dalam menjaga reliabilitas pelaporan keuangan dan memitigasi potensi risiko kecurangan. Pengawasan internal ini diperkuat dengan audit eksternal berkala oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen. Keberadaan komite audit independen berperan penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi risiko kecurangan (Cahyani et al., 2024).
 - d. Budaya Perusahaan: GCG tidak akan berhasil jika hanya dipandang sebagai beban regulasi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai tata kelola dan etika harus dimasukkan ke dalam Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) secara berkelanjutan melalui agenda induksi karyawan baru, pelatihan kepatuhan, serta pemberian penghargaan (reward) bagi unit kerja yang menunjukkan integritas tata kelola terbaik.

Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Etika Bisnis

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG memiliki hubungan positif dengan peningkatan etika bisnis dan reputasi perusahaan (Fakhrani et al., 2023). Eksistensi kerangka kerja GCG yang diimplementasikan secara komprehensif memberikan implikasi dan pengaruh positif yang signifikan terhadap penegakan etika bisnis di lapangan:

a. Meningkatkan Transparansi Perusahaan

Aksesibilitas informasi yang dijamin oleh sistem GCG memaksa pihak manajemen untuk bertindak jujur dan objektif, terutama dalam penyajian data laporan keuangan dan pengungkapan fakta transaksi material, sehingga meminimalkan ruang manipulasi.

b. Mengurangi Tindakan Kecurangan (Fraud)

Sistem akuntabilitas dan pemisahan fungsi yang ketat secara otomatis mempersempit celah terjadinya praktik korupsi, suap menyuap, markup anggaran, penyelewengan dana aset, maupun penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum internal perusahaan. Sistem pengawasan yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya fraud dalam organisasi (Effendi, 2016).

c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dan Investor

Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis tinggi dinilai memiliki profil risiko investasi yang sangat rendah. Hal ini mempermudah korporasi dalam menarik minat modal investor asing, memperoleh fasilitas kredit perbankan dengan suku bunga kompetitif, serta memupuk loyalitas pelanggan jangka panjang.

d. Membentuk Budaya Kerja yang Etis

GCG menciptakan ekosistem kerja yang transparan, sehat, dan berbasis meritokrasi. Sistem ini menjunjung tinggi keadilan, memberikan hak kesejahteraan karyawan sesuai porsinya, serta menolak keras segala bentuk diskriminasi gender, suku, maupun agama di lingkungan kantor.

e. Meningkatkan Reputasi Perusahaan

Citra positif sebagai entitas bisnis yang berintegritas tinggi bertindak sebagai keunggulan kompetitif yang kuat di pasar global. Korporasi yang mengintegrasikan tata kelola etis ke dalam rantai keputusannya terbukti lebih resilien menghadapi krisis ekonomi serta mampu mempertahankan legitimasi hukum dan sosial dari masyarakat dalam jangka Panjang. Perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik cenderung memperoleh tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang mengabaikan aspek tata kelola (OECD, 2023).

Kendala Dalam Penerapan GCG

Meskipun disadari membawa dampak positif bagi korporasi, proses adopsi dan implementasi GCG di lapangan pada kenyataannya masih kerap berhadapan dengan berbagai hambatan sistemik:

- a. Kurangnya Kesadaran Etika: Hambatan utama terletak pada pola pikir (*mindset*) sumber daya manusia internal yang masih memandang GCG sebatas kewajiban formalitas hukum atau



- beban administratif belaka (*checklist compliance*). Banyak pihak menganggap pemenuhan GCG hanya demi mematuhi aturan otoritas pasar modal atau pemerintah, tanpa ada keinginan untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam aktivitas operasional harian.
- b. Lemahnya Pengawasan: Banyak perusahaan memiliki struktur Komite Audit atau Komisaris Independen, namun perannya tidak berjalan optimal karena adanya keterbatasan akses informasi atau intervensi dari pemilik saham mayoritas. Selain itu, saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sering kali efektif karena tidak mampu menjamin kerahasiaan identitas, sehingga karyawan merasa takut akan adanya intimidasi atau mutasi jika melaporkan kecurangan.
 - c. Adanya Kepentingan Pribadi (*Agency Conflict*)
Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), konflik kepentingan sering muncul karena adanya asimetri informasi antara pihak pengelola profesional (agent/direksi) dan pemilik modal (*principal/shareholders*). Oknum pengelola sering kali memprioritaskan maksimalisasi keuntungan finansial pribadi atau kelompok jangka pendek melalui kebijakan yang berisiko, mengabaikan etika bisnis, dan mengorbankan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan GCG (Jensen & Meckling, 1976).
 - d. Kurangnya Komitmen Perusahaan
Hambatan ini dipicu oleh lemahnya komitmen dan keteladanan yang ditunjukkan oleh manajemen puncak (*tone at the top*). Apabila jajaran Direksi dan Komisaris kedapatan sering melanggar aturan internal atau berkompromi dengan praktik gratifikasi, maka moral kerja karyawan di level bawah akan merosot dan mengikutinya, sehingga merusak seluruh tatanan sistem GCG yang telah dirancang.

Solusi Dalam Penerapan GCG

Guna meruntuhkan berbagai kendala sistemik tersebut dan mengoptimalkan penegakan etika bisnis, korporasi wajib mengeksekusi Langkah-langkah solutif strategis berikut:

- a. Sosialisasi dan Pelatihan Etika Bisnis: Perusahaan harus menyelenggarakan program edukasi, workshop, dan pelatihan penegakan GCG secara inklusif dan berkala bagi seluruh lapisan karyawan. Materi pelatihan tidak boleh sekadar teori hukum, melainkan harus berbasis studi kasus riil mengenai dilema etika kerja, agar karyawan sensitif dan mampu mengambil keputusan secara jujur di lapangan. Program pelatihan dan sosialisasi etika bisnis secara berkala dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya integritas dalam pekerjaan (OECD, 2023).
- b. Penguatan Sistem Pengawasan: Perusahaan wajib menjamin independensi mutlak Komite Audit dari intervensi operasional Direksi. Di samping itu, perusahaan harus membenahi whistleblowing system dengan mengadopsi platform pelaporan digital berbasis enkripsi pihak ketiga yang menjamin keamanan, anonimitas, dan perlindungan hukum penuh bagi para pelapor pelanggaran dari tindakan balas dendam korporasi.
- c. Keteladanan dari Pimpinan: Jajaran Direksi, Komisaris, dan kepala divisi harus bertindak sebagai teladan perilaku utama (*role model*) dalam mempraktikkan etika bisnis sehari-hari. Pemimpin harus menunjukkan konsistensi dalam mematuhi jam kerja, menolak segala bentuk hadiah dari vendor, dan berani mengambil keputusan tegas yang berpihak pada nilai kejujuran meskipun berisiko mengurangi laba jangka pendek. Budaya kepatuhan yang konsisten selalu mengalir dari atas ke bawah.
- d. Evaluasi dan Perbaikan Sistem Secara Berkala

Korporasi perlu melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan audit tata kelola secara periodik dengan melibatkan lembaga konsultan independen luar. Langkah ini penting untuk mengukur indeks kepatuhan GCG, mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan internal sejak dini, serta memperbarui klausul Buku Pedoman Perilaku agar selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan dinamika regulasi pemerintah yang baru.



4. KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang penting dalam meningkatkan etika bisnis. Melalui internalisasi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan (TARIF), korporasi dapat membangun benteng pertahanan yang kuat terhadap berbagai praktik menyimpang seperti korupsi dan manipulasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu perusahaan menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Keberhasilan penerapan GCG dipengaruhi oleh komitmen seluruh pihak dalam perusahaan, terutama keteladanan nyata dari pihak manajemen puncak (*tone at the top*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Literature review: Implementasi etika bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 76–88.
- Effendi, M. A. (2020). Business ethics: A connection to good corporate governance implementation. *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, 4(2).
- Fakhrani, N., Ambarwati, D. A., Sholihah, F. A., dkk. (2023). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Etika Profesi dan Bisnis dalam Perusahaan. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Akuntansi, dan Kelayakan Bisnis (SEMANAK), Universitas Muria Kudus.
- Wulandari, S. (2015). Good Corporate Governance dalam Perspektif Etika Bisnis. *Journal Applied Business and Economics*, 1(3), 184-199.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*.
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*.